



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan POM IX Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 310633 Faksimile : (0711) 319819 Kode Pos 30137

Laman : <https://bapenda.sumselprov.go.id>, Pos-el bapendasumateraselatan@gmail.com

Palembang, 2 Juni 2026

Nomor : 050/II/ 000651 /Penda/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 3 (tiga) Berkas
Hal : Penyampaian Dokumen Tindak Lanjut
Hasil Evaluasi AKIP 2025

Kepada

Yth. 1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

di

Palembang

Menindaklanjuti Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/41/AA.04/2026 tanggal 12 Mei 2026 Hal Permintaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP 2025, bersama ini kami sampaikan dokumen Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, untuk dokumen *softcopy evidence* TL Hasil Evaluasi AKIP 2025 tersebut telah kami unggah pada tautan ini : <https://s.id/LHE-TL-AKIP-KEMENPAN-BAPENDASS>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA, (IV/d)
NIP. 19810923 200012 1 001

Lampiran : Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Sumsel
Nomor : 050/1/000651 /penda/2026
Tanggal : 02 Juni 2026

MATRIKS TINDAKLANJUT
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025

NO.	KOMPONEN PENILAIAN LHE		KONDISI TERKINI	RENCANA AKSI	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNGJAWAB (PIC/SUPPORT)	STATUS/PROGRESS PENYELESAIAN	BUKTI DUKUNG	KET
	Temuan/Catatan	Rekomendasi										
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
A.	PERENCANAAN KINERJA											
1.	Setiap unit/satuan kerja belum sepenuhnya memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan Setiap pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Mengadakan workshop atau forum diskusi rutin untuk menjelaskan visi, misi dan target kinerja organisasi serta menyelenggarakan forum evaluasi kinerja secara berkala untuk meninjau capaian serta hambatan setiap unit, guna meningkatkan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap hasil kinerja	Sebagian besar unit kerja telah memahami kinerja namun belum sepenuhnya peduli dan komitmen dalam mencapai kinerja	Menyusun jadwal workshop kinerja secara rutin (triwulan/semester)	Jumlah dokumen jadwal workshop kinerja	1 dok	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Triwulan I	Sekretariat Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	selesai	https://drive.google.com/folders/1ifj30bZNdgA9dzH8HlrzkLR5qLkQ9UBr?usp=drive_link	
				Penyusunan komitmen bersama antara Kepala Badan dan Unit Kerja	Jumlah Perjanjian Kinerja yang ditandatangani	35 dok	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Triwulan I	Sekretariat Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	selesai	https://drive.google.com/folders/1tEBCzAePHh34EIP-gd-2NiQrdfeyiGzD?usp=drive_link	
				Pelaksanaan workshop internalisasi visi-misi ke dalam tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah	Frekuensi pelaksanaan workshop	2 kali	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Triwulan III dan IV	Sekretariat Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	belum	https://drive.google.com/folders/105HBA1A01Me356-vH6k-BkcnP1Ba3JV0?u	

											sp=drive_link	
				Melaksanakan rapat koordinasi internal pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala waktu (per triwulan)	Frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi	4 kali	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Triwulan I, II, III dan IV	Sekretariat Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	belum	https://drive.google.com/drive/folders/1mjsFXCVsSfyiARcJry8frItU0RH194Iq?usp=drive_link	
				Melaksanakan rapat koordinasi internal mengenai refleksi kinerja Triwulan IV 2025	Frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi	1 kali	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Triwulan I	Sekretariat Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1LjajmI4VXN6FIgADjuVGL5WSXe3YfQQu?usp=drive_link	
				Melaksanakan rapat koordinasi internal mengenai orientasi target kinerja Tahun 2026 bagi Para Kepala UPTB PPD Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan	Frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi	1 kali	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Triwulan I	Bidang P2PATDA	selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1H8n5OVO-SIEI-zgEqVV5beUTbv4DNkwI?usp=drive_link	
				Rencana pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja triwulan II tahun 2026	Frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi	1 kali	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Triwulan II	Sekretariat Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	belum	https://drive.google.com/drive/folders/14qkvIA-ILQfm6Pi-nlFRPG4xK8rTKB6t?usp=drive_link	
				Rencana pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja	Frekuensi pelaksanaan	1 kali	Evaluasi Kinerja	Triwulan III	Sekretariat Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	belum	https://drive.google.com/drive/fol	

				triwulan III tahun 2026	rapat koordinasi		Perangkat Daerah				ders/124ts3tbJY0xY9jBTiNzrfWp3gW8W-9MH?usp=drive_link	
				Rencana pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja triwulan IV tahun 2026	Frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi	1 kali	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Triwulan IV	Sekretariat Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	belum	https://drive.google.com/drive/folders/1iF31TnuOMx0IJWVmOuzEGIKI-HmmPyU0?usp=drive_link	
2.	Setiap pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan											
B.	PENGUKURAN KINERJA											
1.	Belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	Rencana aksi menjabarkan rincian aktivitas yang dapat menggambarkan langkah-langkah operasional sesuai dengan semua sasaran strategis yang ada di dalam Renstra Perangkat Daerah	Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja telah ada	Menyusun sistem prosedur pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	Jumlah dokumen pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	1 dok	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Triwulan I	Sekretariat Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1gK6w2EPLRDeHIt2c60GUYaFRlrKXJWFv?usp=drive_link	
				Inventarisasi seluruh sasaran strategis dalam Renstra	Jumlah dokumen inventarisasi	1 dok	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Triwulan I	Sekretariat Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1W9ojSW9qa4QFJfYaQghs onSe9Zfa-	

											r_j?usp=drive_link	
				Penyelarasan sasaran strategis dengan program dan kegiatan	Jumlah dokumen hasil penyelarasan	1 dok	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Triwulan I	Sekretariat Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1ifjSocQCeHw12-akdcMLZzB9Bx6222l?usp=drive_link	
				Penyusunan rincian aktivitas operasional	Jumlah dokumen rincian aktivitas operasional	1 dok	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Triwulan I	Sekretariat Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1UaM9G1qOVodJ39sHLua6jDwmF4j4fdCJ?usp=drive_link	
				Penetapan indikator dan target capaian	Jumlah dokumen penetapan indikator dan target capaian	1 dok	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Triwulan I	Sekretariat Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1HDNoM7kIHk1yas3UBgNngVQ63dzU9Up?usp=drive_link	
				Penyusunan jadwal implementasi (time schedule)	Jumlah dokumen jadwal implelementasi	1 dok	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Triwulan I	Sekretariat Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1GiKefCVle9YhR38K4MYhMfxjnjBHp2Iv?usp=drive_link	

	n) tunjangan kinerja/penghasilan		pemberian tunjangan kinerja	Provinsi Sumatera Selatan terkait rekomendasi ini							xlo6Ta-ph5W7C Ee45uhZ M18Znqt suF?usp=drive_li nk	
				Menyusun bahan materi terkait dengan pembahasan TPP Pertimbangan Objektif Lainnya	Jumlah dokumen bahan materi	1 dok	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Triwulan I	Sekretariat Subbag Keuangan	selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1QJmdXYxU0jV_fydo5VUJQRInwB347nrC?usp=drive_link	
				Melaksanakan rapat koordinasi internal terkait pembahasan rencana awal isu strategis terkait pembahasan TPP Pertimbangan Objektif Lainnya	Frekuensi rapat koordinasi	1 kali	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Triwulan I	Sekretariat Subbag Keuangan	selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1gocxcD9yaGO-DdyJ7_8QhlfvkNE4ph2L?usp=drive_link	
5.	Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (<i>Refocusing</i>) organisasi		Pengukuran kinerja saat ini belum mempengaruhi penyesuaian organisasi	Meminta arahan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan terkait perubahan Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK)	Jumlah dokumen nota dinas	1 dok	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Triwulan I	Sekretariat Subbag Umum dan Kepegawaian	selesai	https://drive.google.com/drive/folders/16YdcyxU1h1MeVfuII8i6_yfFeS9K6n_d?usp=drive_link	
				Menyusun Kerangka Acuan Kerja terkait rencana perubahan SOTK	Jumlah dokumen Kerangka Acuan Kerja	1 dok	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Triwulan I	Sekretariat Subbag Umum dan Kepegawaian	selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1u0v5jwqqG63gOD8uqzstjVAytb357_C3?usp=drive_li nk	

				Menyusun bahan materi rencana perubahan SOTK	Jumlah dokumen bahan materi rencana perubahan SOTK	1 dok	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Triwulan I	Sekretariat Subbag Umum dan Kepegawaian	selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1-rwQ5EzYR5RKZmAl-7Z3bjKknS40xDc_?usp=drive_link	
				Melaksanakan rapat koordinasi internal terkait pembahasan rencana awal isu strategis terkait rencana perubahan SOTK	Frekuensi rapat koordinasi	1 kali	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Triwulan I	Sekretariat Subbag Umum dan Kepegawaian	selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1C-NM-ZJJkAUUOnXbcpiEu8EdEDw9IPkE8?usp=drive_link	
6.	Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja	Dokumen pengukuran kinerja tidak hanya di dasarkan dari pengukuran atas realisasi penyerapan anggaran, tetapi juga di dasarkan dari pengukuran atas realisasi capaian kinerja atas indikator kinerja	Dokumen pengukuran kinerja saat ini telah menggambarkan mengenai realisasi penyerapan anggaran yang mendukung atas realisasi capaian kinerja atas indikator kinerja	Membuat kertas kerja terkait dengan pengukuran kinerja	Jumlah dokumen kertas kerja	1 dok	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Triwulan I	Bidang P2PATDA	selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1p1xW3hRwnL9iy83BSGa2RGNC_dhOagkg?usp=drive_link	
				Melaksanakan pengukuran kinerja atas realisasi penyerapan anggaran berdasarkan Permenpan 53/2014, SE Sekda Nomor 060/047/SE/2023 serta Permenkeu 214/PMK.02/2017	Jumlah dokumen	1 dok	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Triwulan I	Sekretariat Subbag Keuangan	selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1-GCKss3uaUb86uMsdJwEDO93Zt4K6ofL?usp=drive_link	
C.	PELAPORAN KINERJA											
1.	Dokumen laporan kinerja belum menginformasikan	Jadwalkan pembahasan laporan kinerja	Dokumen laporan kinerja telah	Melaksanakan pelaporan kinerja yang	Jumlah dokumen	1 dok	Evaluasi Kinerja	Triwulan I	Sekretariat Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	selesai	https://drive.google.com/	

	perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya	sebagai agenda tetap dalam rapat pimpinan yang tidak hanya membahas realisasi penyerapan anggaran, tetapi juga membahas capaian atas rencana kerja masing-masing indikator kinerja	menggambarkan perbandingan realisasi kinerja tahun sebelumnya	menginformasikan perbandingan kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya secara berkesinambungan			Perangkat Daerah				drive/folders/1wJvzR3Lg9TIYUQ8ciDzV3kliU4B?usp=drive_link	
2.	Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi perhatian utama pimpinan		Informasi dalam laporan kinerja telah menjadi perhatian pimpinan	Melaksanakan rapat koordinasi internal secara rutin berkala yang dipimpin oleh Kepala Badan	Frekuensi rapat koordinasi internal	12 kali	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Triwulan I, II, III dan IV	Sekretariat Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1ajUw26hFcCru7uW5Xc6saDW_buGLGYGR?usp=drive_link	
				Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pencapaian kinerja Triwulan IV tahun 2025	Frekuensi rapat koordinasi internal	1 kali	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Triwulan I	Sekretariat Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1KxV50t004LOLQHSkSxtYDidxddvUSVN?usp=drive_link	
				Melaksanakan rapat koordinasi internal mengenai orientasi target kinerja Tahun 2026 bagi Para Kepala UPTB PPD Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan	Frekuensi rapat koordinasi internal	1 kali	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Triwulan I	Sekretariat Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1TobZzDqvQsVt35bHc-Av7r1ZSDwugGnE?usp=drive_link	
				Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pencapaian kinerja Triwulan I tahun 2026	Frekuensi rapat koordinasi internal	1 kali	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Triwulan I	Sekretariat Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1_WmFI3i47_Wv9sy3wurGZRk60rg	

											SVL8?usp=drive_link	
				Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pencapaian kinerja Triwulan II tahun 2026	Frekuensi rapat koordinasi internal	1 kali	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Triwulan II	Sekretariat Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	belum	https://drive.google.com/drive/folders/1OB79Iv8-dCDfKnAxwqVGTNulRCq9QK_v?usp=drive_link	
				Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pencapaian kinerja Triwulan III tahun 2026	Frekuensi rapat koordinasi internal	1 kali	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Triwulan III	Sekretariat Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	belum	https://drive.google.com/drive/folders/1VIZXKV4UDGDaNHDGDaNH44BOxu7pstTjk7dLdx?usp=drive_link	
				Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pencapaian kinerja Triwulan IV tahun 2026	Frekuensi rapat koordinasi internal	1 kali	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Triwulan IV	Sekretariat Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	belum	https://drive.google.com/drive/folders/1cTM4ouxXHd5r-TfxHh6KIn6_6FiHFI0w?usp=drive_link	
D.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL											
1.	Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja	Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP akan dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja	Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja	Melaksanakan pendataan dan validasi data kinerja dengan aplikasi SIGUNTANG (Sistem Informasi Penagihan Untuk Pajak Kendaraan Bermotor Terintegrasi)	Jumlah aplikasi yang digunakan	1 aplikasi	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Triwulan I	UPTB Puslia	selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1gSwkautS9iBtkYOaDLRPuZWPUG96jonR?usp=drive_link	

				Menggunakan analisis CSF (<i>critical success factor</i>) untuk peningkatan kinerja	Jumlah dokumen analisis	1 dok	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Triwulan I	Sekretariat Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1OfSP1ZI8hH9clg-2HYkBHGgRFXMRw5Jv?usp=drive_link	
				Melaksanakan pendataan dan validasi kendaraan bermotor sebagai data basis pajak daerah	Jumlah dokumen pendataan dan validasi	1 dok	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Triwulan I	Sekretariat Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1LqkvZD6AMufsz5CaPgOY3A0j0_20sqA1?usp=drive_link	

Palembang, 02 Juni 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 198109232000121001

Lampiran 2 : Surat Kepala Bapenda Prov. Sumsel

Nomor : 050/1/000651/penda/2026

Tanggal : 02 Juni 2026

PERUBAHAN SIGNIFIKAN
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2026

A. KOMPONEN SAKIP

1. Perencanaan Kinerja

- a. Perencanaan kinerja yang disusun telah memenuhi standar sesuai dengan ketentuan yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang memenuhi kriteria SMART, menggunakan *logica frame work* penyelarasan (*cascading*) di setiap level secara logis, serta telah memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*):
 - ❖ Perencanaan kinerja telah diformalkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
 - ❖ Perencanaan kinerja telah di publikasikan tepat waktu melalui website resmi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - ❖ Perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai sesuai dengan target penetapan dalam dokumen perencanaan;
 - ❖ Kualitas rumusan hasil (tujuan dan sasaran strategis) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai;
 - ❖ Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) telah memenuhi kriteria SMART;
 - ❖ Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable* – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis);
 - ❖ Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (*achievable*), menantang dan realistis;
 - ❖ Seluruh pegawai telah merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja
- b. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan:
 - ❖ Anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai;
 - ❖ Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai;
 - ❖ Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja telah dicapai dengan baik atau setidaknya masih *on the right track*;
 - ❖ Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala;
 - ❖ Perbaikan atau penyempurnaan perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya;
 - ❖ Perbaikan atau penyempurnaan perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi atau hasil yang lebih baik;
 - ❖ Sudah ada kepedulian, pemahaman serta komitmen setiap unit atau satuan kerja dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan
 - ❖ Sudah ada kepedulian, pemahaman serta komitmen setiap pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan

2. Pengukuran Kinerja

- a. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien serta telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan:
 - ❖ Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja;
 - ❖ Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan berdasarkan sumber resmi dari website BPS, DJPK Kementerian Keuangan dan LRA BPKAD Provinsi Sumatera Selatan;
 - ❖ Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
 - ❖ Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala bulanan melalui kertas kerja perhitungan kinerja pada setiap indikator;
 - ❖ Unit kerja telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang;
 - ❖ Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) antara lain aplikasi SIGUNTANG
 - ❖ Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) antara lain e SAKIP reuiu, SIPD, esr.
- b. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward and punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien:
 - ❖ Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian / pengurangan) tunjangan kinerja atau penghasilan;
 - ❖ Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan atau penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional;
 - ❖ Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, namun telah diusulkan untuk perubahan Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK);
 - ❖ Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
 - ❖ Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja;
 - ❖ Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja;
 - ❖ Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
 - ❖ Efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja telah dilakukan;
 - ❖ Unit kerja atau satuan kerja telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja;
 - ❖ Setiap pegawai telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja

3. Pelaporan Kinerja

- a. Pelaporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan atau kegagalan kinerja serta upaya perbaikan atau penyempurnaannya:
 - ❖ Laporan kinerja telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - ❖ Laporan kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja;
 - ❖ Laporan kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan yang telah ditetapkan;
 - ❖ Laporan kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
 - ❖ Laporan kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun – tahun sebelumnya;
 - ❖ Laporan kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional atau internasional (*benchmark* kinerja)

- ❖ Laporan kinerja telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;
- ❖ Laporan kinerja telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
- ❖ Laporan kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)
- b. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi atau kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya:
 - ❖ Laporan kinerja telah menjadi perhatian pimpinan;
 - ❖ Laporan kinerja telah menjadi kepedulian seluruh pegawai;
 - ❖ Laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja;
 - ❖ Laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja;
 - ❖ Laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;
 - ❖ Laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
 - ❖ Laporan kinerja telah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi
- 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - a. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai:
 - ❖ Evaluasi AKIP internal telah dilaksanakan sesuai standar;
 - ❖ Evaluasi AKIP internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai;
 - ❖ Evaluasi AKIP internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai;
 - ❖ Evaluasi AKIP internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja;
 - ❖ Evaluasi AKIP internal telah dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi (aplikasi).
 - b. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi kinerja:
 - ❖ Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP internal telah ditindaklanjuti;
 - ❖ Implementasi SAKIP telah terjadi peningkatan dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal;
 - ❖ Hasil evaluasi AKIP internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
 - ❖ Hasil evaluasi AKIP internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja;
 - ❖ Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal

B. UPAYA STRATEGIS YANG TELAH DILAKUKAN

1. Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Penagihan Untuk Pajak Kendaraan Bermotor Terintegrasi (SIGUNTANG) untuk mendata dan menginformasikan kepada seluruh wajib pajak kendaraan bermotor bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor telah memasuki jatuh tempo pembayaran. Penggunaan Aplikasi SIGUNTANG ini mendata kendaraan bermotor pada titik kumpul parkir kendaraan di pasar (tradisional maupun modern), rumah sakit, perkantoran (pemerintahan, BUMN/BUMD maupun swasta), sekolah;
2. Melaksanakan studi pembelajaran tata kelola pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) di Provinsi Riau serta pembelajaran tata cara perhitungan debit air penggunaan air permukaan untuk meningkatkan pendapatan Pajak Air Permukaan di Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Upaya sinergi pendanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB bersama dengan 17 (tujuh belas) pemerintahan kabupaten/kota se Sumatera Selatan dalam rangka peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor Pemerintah Provinsi dan pendapatan opsen PKB dan Opsen BBN-

KB Kabupaten/Kota dapat meningkatkan kinerja fiskal daerah maupun kontribusi pajak daerah terhadap PDRB.

C. UPAYA LAINNYA

1. Refocusing penggunaan anggaran pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp. 997.950.140,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu seratus empat puluh rupiah), untuk peningkatan kinerja fiskal daerah dengan refocusing program kegiatan sub kegiatan dan realokasi penggunaan anggaran;
2. Optimalisasi Pendapatan Pajak daerah dengan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui pembayaran non tunai pembayaran pajak daerah dengan QRIS telah meningkatkan pendapatan pajak daerah. Pembayaran retribusi daerah non tunai melalui QRIS dengan pelaporan melalui Retribusi Online Sumatera Selatan;
3. Strategi melalui sinergi dan kolaborasi bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan melalui pendataan dan validasi kendaraan bermotor untuk meningkatkan kinerja pajak daerah dengan data yang valid;
4. Kerjasama pemanfaatan data Nomor Induk Kependudukan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor berkontribusi dalam peningkatan pendapatan pajak daerah sektor pajak kendaraan bermotor.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



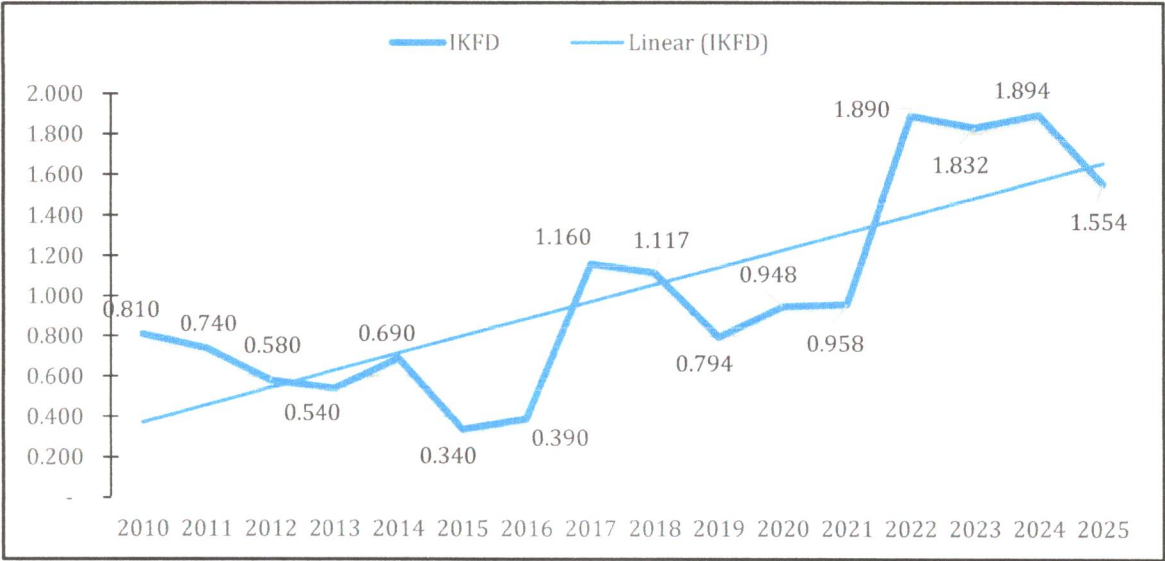
Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19809232000121001

Lampiran 3 : Surat Kepala Bapenda Prov. Sumsel
Nomor : 050/1/00651/Penda/2026
Tanggal : 02 Juni 2026

HUBUNGAN KEBERHASILAN SASARAN STRATEGIS
DENGAN CAPAIAN INDIKATOR IKU KEPALA DAERAH

A. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah: 1,554

Perkembangan indeks kapasitas fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan mengalami kondisi fluktuatif, namun menunjukkan trend yang terus mengalami peningkatan selama periode pengamatan dari mulai tahun 2010 sampai 2025. Hal ini mengindikasi bahwa kinerja kapasitas fiskal dari sisi Pendapatan Daerah menunjukkan kinerja positif yang terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan belanja pada peningkatan pelayanan publik. Pendapatan Asli Daerah ditunjukkan dengan kinerja positif dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sementara pendapatan dari transfer pusat ke daerah juga meningkat terutama jenis transfer pusat ke daerah yang sudah ditentukan penggunaannya. Trend peningkatan indeks kapasitas fiskal daerah ditunjukkan pada Gambar berikut.



Namun secara tahunan (*year on year*) perbandingan indeks kapasitas fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan antara tahun 2024 dan tahun 2025 mengalami penurunan dari indeks 1,894 menjadi indeks 1,554 hal ini disebabkan karena kondisi:

1. Penerapan opsen PKB dan opsen BBN-KB yang dimulai sejak tanggal 05 Januari 2025 yang menerapkan perubahan transfer dana bagi hasil pajak PKB dan pajak BBN-KB dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintahan Kabupaten/Kota dari bagi hasil menjadi pola opsen PKB dan opsen BBN-KB secara *real time* harian yang langsung masuk ke rekening RKUD Pemerintahan Kabupaten/Kota. Sehingga secara akuntansi pencatatan laporan realisasi pendapatan pajak PKB dan pajak BBN-KB tidak dicatat sebagai realisasi pendapatan pajak Pemerintah Provinsi;
2. Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan tidak memberatkan pembayaran pajak PKB dan pajak BBN-KB bagi masyarakat, Pemerintah Provinsi memberlakukan kebijakan pembayaran pajak PKB dan pajak BBN-KB berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintahan Daerah equivalen dengan pembayaran pajak PKB dan pajak BBN-KB sama seperti pembayaran pajak berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang

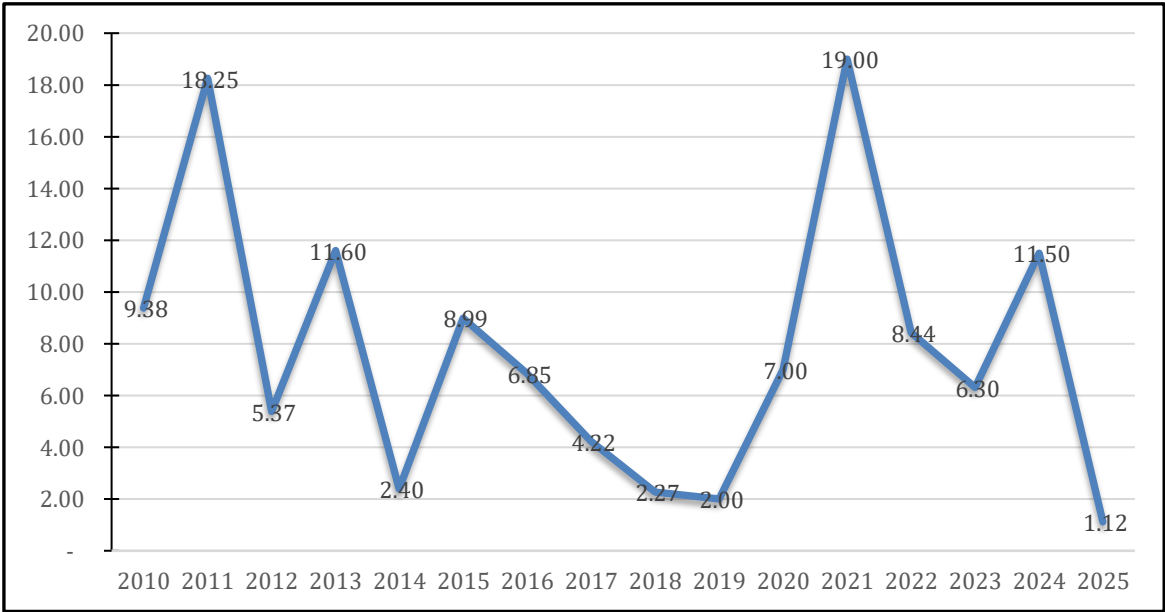
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehingga dampak terhadap pendapatan pajak PKB dan pajak BBN-KB mengalami penurunan;
3. Kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dimana formasi gaji PPPK dicatat dalam komponen belanja pegawai. Belanja pegawai merupakan komponen bilangan pembagi untuk perhitungan indikator kinerja indeks kapasitas fiskal daerah. Penambahan belanja pegawai ini akan mempengaruhi dalam perhitungan indeks kapasitas fiskal daerah;
 4. Namun secara total pendapatan pajak daerah per jenis pajak daerah dijelaskan pada Tabel berikut.

NO.	JENIS PAJAK	CAPAIAN KINERJA TA. 2025		
		TARGET	REALISASI	%
1.	PKB	771.441.317.847,00	778.888.270.431,00	100,97
2.	BBN-KB	797.803.083.370,00	671.258.239.000,00	84,14
3.	PBB-KB	1.473.535.793.624,00	1.719.840.624.162,49	116,72
4.	PAP	26.540.973.333,00	45.139.844.782,29	170,08
5.	PAJAK ALAT BERAT	6.000.000.000,00	3.874.594.593,00	64,58
6.	PAJAK ROKOK	730.171.774.938,00	692.337.957.922,00	94,82
7.	OPSEN MBLB	27.874.543.495,00	16.506.805.333,05	59,22
JUMLAH		3.833.367.486.607,00	3.927.846.336.223,83	102,46

Berdasarkan Tabel diatas, realisasi pendapatan pajak daerah mengalami surplus dari target sebesar Rp. 94.478.849.616,83 atau sebesar 2,46 %

B. Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (*Revenue Mobilization*): 1,12

Pendapatan termobilisasi (*revenue mobilization*) merupakan upaya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk menjaga terus meningkatnya kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal. Dengan indiaktornya untuk mendekatkan pendapatan termobilisasi (*revenue mobilization*) pada garis normal yang telah ditentukan sejak perencanaan awal. Efek deviasi yang terjadi, ketika jarak deviasi yang semakin kecil dari kondisi penerimaan pendapatan dari perencanaan awal, maka kondisi nya semakin baik, hal ini mengindikasikan bahwa kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal semakin baik. Selama periode pengamatan dari tahun 2010 sampai dengan 2025 perkembangan indikator ini sangat fluktuatif seperti pada Gambar berikut.



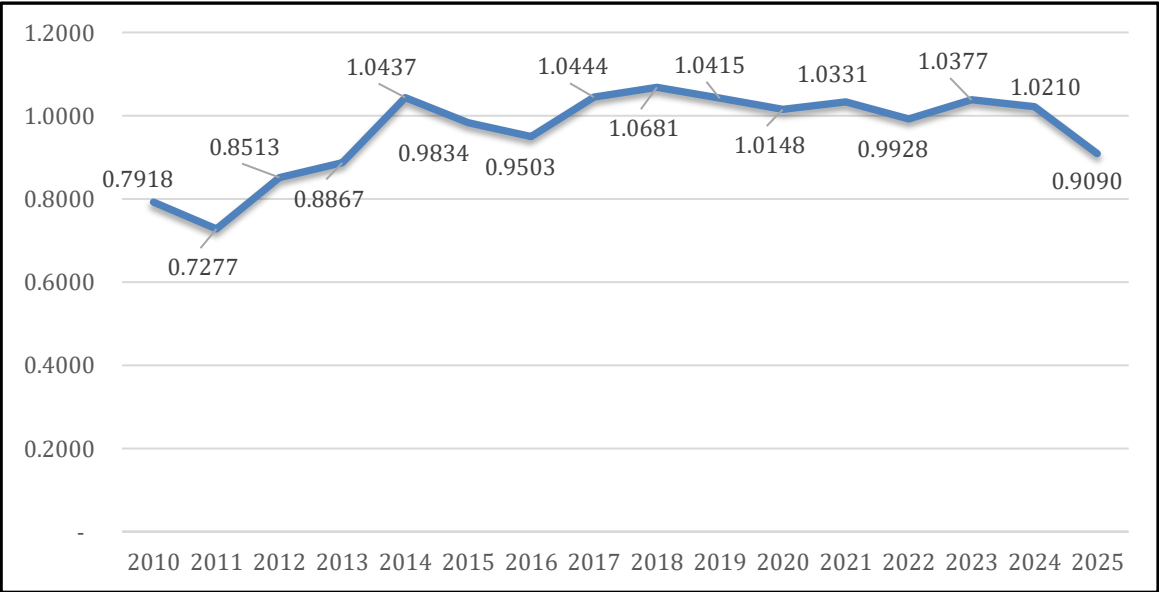
Secara tahunan (*year on year*) perbandingan kinerja tahun 2024 dan tahun 2025, dimana indikator kinerja ini mengalami peningkatan perbaikan (mendekati garis normal atau garis perencanaan awal) dari 11,50 menjadi 1,12 hal dikarenakan kondisi:

1. Nilai proyeksi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disusun pada saat perencanaan awal (tahun n-1) telah mendekati garis normal (kredibilitas) dari rencana awal;

C. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB: 0,909

Peran pendapatan pajak daerah dalam perekonomian regional itu sendiri ditunjukan dengan membandingkan realisasi pajak daerah terhadap total pendapatan dari perekonomian daerah provinsi, rasio pajak daerah (*local tax ratio*) yaitu perbandingan antara realisasi pajak daerah dengan total pendapatan dari aktivitas ekonomi regional provinsi. Sistem pengaturan keuangan daerah, rasio pajak daerah merupakan perbandingan antara pajak daerah yang diterima sesuai dengan kewenangan dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), angka rasio pajak daerah dipengaruhi oleh pangsa PDRB.

Peran lain dari pendapatan pajak akan mempengaruhi *ekspansi* atau relaksasi kegiatan produksi, pengeluaran, serta penghematan rumah tangga. Dari struktur pajak yang dikelola oleh kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, fungsi pajak yang dapat mempengaruhi harga produk dengan memberikan stimulus fiskal sehingga dapat meningkatkan aktivitas perekonomian suatu daerah wilayah tertentu sesuai dengan karakteristik dari daerah. Perkembangan *local tax ratio* selama periode pengamatan dari tahun 2010 sampai tahun 2025 ditunjukan pada Gambar berikut.



Namun secara tahunan (*year on year*) perbandingan indeks kapasitas fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan antara tahun 2024 dan tahun 2025 mengalami penurunan dari rasio 1,0210 menjadi rasio 0,909 hal ini disebabkan karena kondisi:

1. Penerapan opsen PKB dan opsen BBN-KB yang dimulai sejak tanggal 05 Januari 2025 yang menerapkan perubahan transfer dana bagi hasil pajak PKB dan pajak BBN-KB dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintahan Kabupaten/Kota dari bagi hasil menjadi pola opsen PKB dan opsen BBN-KB secara *real time* harian yang langsung masuk ke rekening RKUD Pemerintahan Kabupaten/Kota. Sehingga secara akuntansi pencatatan laporan realisasi pendapatan pajak PKB dan pajak BBN-KB tidak dicatat sebagai realisasi pendapatan pajak Pemerintah Provinsi;
2. Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan tidak memberatkan pembayaran pajak PKB dan pajak BBN-KB bagi masyarakat, Pemerintah Provinsi memberlakukan kebijakan pembayaran pajak PKB dan pajak BBN-KB berdasarkan Undang – Undang Nomor

- 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintahan Daerah equivalen dengan pembayaran pajak PKB dan pajak BBN-KB sama seperti pembayaran pajak berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehingga dampak terhadap pendapatan pajak PKB dan pajak BBN-KB mengalami penurunan;
3. Namun secara total pendapatan pajak daerah per jenis pajak daerah dijelaskan pada Tabel berikut.

NO.	JENIS PAJAK	CAPAIAN KINERJA TA. 2025		
		TARGET	REALISASI	%
1.	PKB	771.441.317.847,00	778.888.270.431.00	100,97
2.	BBN-KB	797.803.083.370,00	671.258.239.000,00	84,14
3.	PBB-KB	1.473.535.793.624,00	1.719.840.624.162,49	116,72
4.	PAP	26.540.973.333,00	45.139.844.782,29	170,08
5.	PAJAK ALAT BERAT	6.000.000.000,00	3.874.594.593,00	64,58
6.	PAJAK ROKOK	730.171.774.938,00	692.337.957.922,00	94,82
7.	OPSEN MBLB	27.874.543.495,00	16.506.805.333,05	59,22
JUMLAH		3.833.367.486.607,00	3.927.846.336.223,83	102,46

Berdasarkan Tabel diatas, realisasi pendapatan pajak daerah mengalami surplus dari target sebesar Rp. 94.478.849.616,83 atau sebesar 2,46 %

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Dr. H. Achmad Rizwan, S. STP., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19809232000121001

Nomor : B/41/AA.04/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 3 berkas
Hal : **Permintaan Tindak Lanjut
Hasil Evaluasi AKIP 2025**

12 Mei 2026

Yth.

1. **Sekretaris Jenderal/Sekretaris Lembaga Negara;**
2. **Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian;**
3. **Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian;**
4. **Asisten Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Polri;**
5. **Asisten Bidang Perencanaan Umum Mabes TNI;**
6. **Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI;**
7. **Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi; dan**
8. **Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.**

di
Tempat

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP, Kementerian PANRB perlu melakukan pra-evaluasi sebagai salah satu tahapan evaluasi AKIP kepada instansi pemerintah pada tahun 2026. Pelaksanaan pra-evaluasi AKIP ini perlu didukung dengan kelengkapan dokumen dan informasi yang memadai sehingga hasil pra-evaluasi nantinya diharapkan dapat menggambarkan kondisi implementasi SAKIP instansi pemerintah secara utuh.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan seluruh instansi pemerintah yang telah dievaluasi AKIP pada tahun 2025 untuk dapat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tindak lanjut atas rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP tahun 2025 melalui Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP;
2. Perubahan signifikan atas implementasi SAKIP sampai dengan saat ini yang berisi, antara lain:
 - Rangkuman penjelasan setiap komponen SAKIP mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
 - Upaya strategis yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP, seperti pemanfaatan sistem informasi berbasis teknologi, kerja sama atau percontohan pemerintah daerah lain, dan sebagainya.
 - Upaya lainnya, seperti refocusing penggunaan anggaran/strategi pencapaian prioritas pembangunan.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 260407RDGR
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



3. Hubungan keberhasilan Sasaran Strategis dengan Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah (Khusus untuk Pemerintah Daerah).

Informasi di atas dapat disampaikan melalui tautan esr.menpan.go.id paling lambat 29 Mei 2026, pada direktori:

1. **TL LHE AKIP Kemenpan** untuk Lampiran 1
2. **Laporan Monev Renaksi** untuk Lampiran 2
3. **Lainnya** untuk Lampiran 3 (Khusus untuk Pemda)

Kementerian PANRB melalui Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan akan melakukan sosialisasi dan diskusi terkait materi surat ini pada hari Senin, 18 Mei 2026 pukul 13.00 WIB - selesai, secara daring melalui aplikasi zoom meeting pada ID Rapat: 852 9521 7778 Kode Sandi: SAKIP2026. Dikarenakan terbatasnya peserta zoom meeting, dimohon agar setiap Instansi Pemerintah hanya mewakilkan melalui 1 (satu) akun.

Demikian permintaan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ERWAN AGUS PURWANTO

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
NIP. 196808021998031001

Tembusan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 260407RDGR
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Lampiran 1

Nomor : B/41/AA.04/2026

Hal : Permintaan Tindak Lanjut

Hasil Evaluasi AKIP 2025

MATRIKS TINDAK LANJUT
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025

No.	Komponen Penilaian LHE		Kondisi Terkini	Rencana Aksi	Indikator	Target	Kegiatan/Subkegiatan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab (PIC/Support)	Status/ Progres Penyelesaian	Bukti Dukung	Ket.
	Temuan/Catatan	Rekomendasi										
A. PERENCANAAN KINERJA												
1.												
2.												
3.												
B. PENGUKURAN KINERJA												
1.												
2.												
3.												
C. PELAPORAN KINERJA												
1.												
2.												
3.												
D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL												
1.												
2.												
3.												

Catatan :

• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'

• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 260407RDG

• Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.

Lampiran 2

Nomor : B/41/AA.04/2026

Hal : Permintaan Tindak Lanjut
Hasil Evaluasi AKIP 2025

[CONTOH]

PERUBAHAN SIGNIFIKAN

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2026

A. KOMPONEN SAKIP

1. Perencanaan Kinerja

[contoh]

- Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*).
- Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
- ...

2. Pengukuran Kinerja

[contoh]

- Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien, serta telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
- ...

3. Pelaporan Kinerja

[contoh]

- Pelaporan kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 260407RDG
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

- Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
- ...

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

[contoh]

- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.
- Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi Kinerja.
- ...

B. UPAYA STRATEGIS YANG TELAH DILAKUKAN

[contoh]

1. Pemanfaatan Sistem Informasi Berbasis Teknologi, seperti Implementasi Peraturan Daerah RTRW sampai RDTR yang telah terintegrasi dengan OSS sehingga memberi kemudahan dalam perizinan penggunaan dan pemantauan lahan bagi industri dan publik .
2. Studi Tiru dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Lain.
3. Kontribusi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota terhadap proyek strategis nasional pada wilayah masing-masing yang termuat dalam RKP dan dana bagi hasil pemda dalam RKPD.
4. ...

C. UPAYA LAINNYA

[contoh]

1. Refocusing Penggunaan Anggaran.
2. Penyesuaian Strategi Khusus Pencapaian Kinerja.
3. Optimalisasi Pajak dan Retribusi daerah melalui digitalisasi yang dibuktikan dengan peningkatan pendapatan yang signifikan dalam 2 tahun terakhir.
4. ...

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 260407RDG
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Lampiran 3

Nomor : B/41/AA.04/2026

Hal : Permintaan Tindak Lanjut
Hasil Evaluasi AKIP 2025

**HUBUNGAN KEBERHASILAN SASARAN STRATEGIS
DENGAN CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH
(Khusus Pemerintah Daerah)**

A. Pertumbuhan Ekonomi : ... (nilai)

Penjelasan ringkas atas pencapaian indikator dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dengan pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis.

B. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : ... (nilai)

Penjelasan ringkas atas pencapaian indikator dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dengan pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis.

C. Tingkat Kemiskinan : ... (nilai)

Penjelasan ringkas atas pencapaian indikator dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dengan pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis.

D. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) : ... (nilai)

Penjelasan ringkas atas pencapaian indikator dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dengan pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis.

E. Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini / Gini Ratio) : ... (nilai)

Penjelasan ringkas atas pencapaian indikator dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dengan pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis.

F. Tingkat Inflasi Daerah : ... (nilai)

Penjelasan ringkas atas pencapaian indikator dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dengan pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 260407RDG
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**